

Analisis Pemetaan Profil Badan Usaha Milik Desa Serta Potensi dan Permasalahannya di Bidang Pengelolaan Air Bersih

(studi kasus di BUMDes Kertajaya, Cianjur,
Provinsi Jawa Barat)

Hanny^{#1}, Lidya Agustina[#], Ita Salsalina Lingga[#], Rapina[#], Yenni Carolina[#], Elyzabeth I Marpaung[#], Erna[#], Herman Kambono[#], Lauw Tjun Tjun[#], Oktavianti[#], Enrico Goiyardi[#]

[#]*Jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha*

Jl. Prof Drg. Surya Sumantri No.65 Bandung

¹sevenhanny@gmail.com

Abstract

Based on comparison data between 2017 and 2018, according to BPS (Statistic Central Data) the number of the poverty rate decreases in the villages is much higher than in urban areas. The role of the government does not escape here through the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration in terms of encouraging all villages to have Village-Owned Enterprises (BUMDes). Although the BUMDes program has been launched since 2010, previous research shows that the BUMDes implementation program still not optimal. Departing from this condition, this research in the context of community service was created with the aim of mapping the profile of BUMDes, as well as finding the potential and controlling BUMDes and related business units. Meanwhile the issuing BUMDes is Kertajaya BUMDes, Cianjur Regency, West Java Province, while the business unit issued is PAB Tirta Jaya which is engaged in the provision of clean water.

BUMDes Kertajaya has various potentials in the fields of clean water, tourism, agriculture, facilities and fisheries. Our research indicate that BUMDes Kertajaya have good governance but still have constraints such as limited internet facilities, units business funding, human resources regeneration, minimum number of operating income and limited infrastructure facilities. While the potential PAB Tirta Jaya to develop its business in the field of clean water supply is quite high, especially in terms of raw materials and marketing. Some of the obstacles faced by PAB Tirta Jaya are the currently inadequate equipment available for business development / expansion, the lack of operating profit, the difficulty of PAB Kerta Jaya in regenerating human resources, the business value of the PAB Tirta Jaya that is currently underway is not yet high.

Keywords— Mapping, potential, constraints, BUMDes, the main business entity.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia untuk pertama kalinya pada bulan Maret 2018 ini mencatat tingkat kemiskinan terendah sejak sepuluh tahun terakhir. Tingkat kemiskinan berada di angka 9,82% penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah

garis kemiskinan mencapai 25,95 juta penduduk (Putera, 2018). Namun data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan untuk tingkat kemiskinan di perkotaan dan di desa. Jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat 7.02% pada bulan Maret 2018 atau setara dengan 10.14

juta orang, sedangkan untuk di pedesaan tercatat 13.20% atau setara dengan

15.81 juta orang. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 10.27 juta orang untuk daerah perkotaan, dan 16.31 juta orang untuk daerah pedesaan. Dengan demikian meskipun kemiskinan di daerah pedesaan masih jauh lebih tinggi dari daerah perkotaan, namun penurunan jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari pada di perkotaan.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan tidak luput karena peranan pemerintah dalam pelaksanaan program-programnya, yang diantaranya melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong seluruh desa untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes terbukti efektif dalam menggerakkan roda perekonomian desa, meskipun sampai dengan 2018 ini jumlah desa yang memiliki BUMDes hanya 18.000 desa dari total 74.000 desa di Indonesia. Namun meskipun demikian jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 505 ribu orang sejak tahun 2017 (finance.detik.com).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, BUMDes adalah badan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes dibentuk atas inisiatif pemerintah desa bersama masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa. Selanjutnya BUMDes akan dikelola oleh masyarakat desa yang dianggap mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, oleh karenanya keberadaan BUMDes sejatinya tidak akan mengancam kegiatan usaha lainnya yang

telah dijalankan oleh penduduk desa sebelumnya. Pembentukan BUMDes harus berdasarkan musyawarah desa dan mampu menggali potensi usaha ekonomi masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Usaha BUMDes dapat memanfaatkan sumber daya desa yang belum optimal yang bertujuan untuk membantu warga desa.

Meskipun program BUMDes telah dicanangkan sejak tahun 2010, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hasil penelitian Ratna Azis Prasetyo (2016) yang meneliti keberadaan BUMDes Desa Pejambon Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes. Sedangkan terkait pola pemanfaatan lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik desa. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian dalam rangka Abdimas (Program Pengabdian Masyarakat) ini bermaksud meneliti mengenai keberadaan BUMDes yang terdapat di Desa Kertajaya, Cianjur. Desa Kertajaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Desa Kertajaya memiliki potensi wisata alam yaitu Danau Cirata serta sumber air yang melimpah. BUMDes Desa Kertajaya memanfaatkan potensi desa yang ada dengan membentuk usaha utamanya yaitu PAB Tirta Jaya yang bergerak di bidang pengadaan air bersih. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana BUMDes di desa Kertajaya Cianjur dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi pengurus BUMDes maupun pengurus PAB Tirta Jaya, bagaimana keberadaan BUMDes dan PAB Tirtajaya tersebut dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat desa Kertajaya, Cianjur, serta melihat potensi yang dimiliki oleh BUMDes dan PAB Tirta Jaya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemetaan BUMDes di Desa Kertajaya, Cianjur dari dimensi tata kelola, tujuan, kajian kelayakan BUMDes dan dari dimensi potensinya?
2. Apa saja yang menjadi potensi dan kendala yang dihadapi oleh Unit Usaha PAB Tirta Jaya di Desa Kertajaya, Cianjur?

C. Tujuan Abdimas

Tujuan utama dalam pengabdian masyarakat ini adalah untuk memetakan BUMDes di Desa Kertajaya, Cianjur dari dimensi tata kelola, tujuan, kajian kelayakan BUMDes dan dari dimensi potensinya. Selanjutnya, tujuan utama lainnya dalam pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui potensi dan kendala yang dihadapi oleh Unit Usaha PAB Tirta Jaya di Desa Kertajaya, Cianjur, sehingga di tahap selanjutnya dari pengabdian masyarakat ini, diharapkan tim dapat membantu mengembangkan potensi BUMDes dan Unit Usaha PAB Tirta Jaya agar dapat bermanfaat secara lebih luas dengan menjadi Unit Usaha yang bernilai jual dan bernilai manfaat tinggi serta mampu mendorong perekonomian dan kesejahteraan warga Kertajaya, Cianjur.

D. Manfaat Abdimas

Adapun manfaat pengabdian masyarakat ini bagi Desa Kertajaya, Cianjur adalah:

1. Membantu Pemerintah Desa dalam menciptakan BUMDes yang efisien dan mampu mensejahterakan masyarakat desa.
2. Membantu Unit Usaha PAB Tirta Jaya dalam melihat potensi dan kendalanya serta membantu mereka dalam memberikan sumbangsih pemikiran demi

kemajuan unit usahanya agar lebih bernilai jual dan bernilai manfaat tinggi serta mampu mendorong perekonomian dan kesejahteraan warga Kertajaya, Cianjur.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Ibrahim (2018:7) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, maka BUMDes berperan sebagai instrument penguatan otonomi desa dan sebagai instrument kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes untuk dapat mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes dikelola langsung dengan melibatkan masyarakat guna mendorong ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan.

Hal senada juga diutarakan oleh Zakaria (2017:110) bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diyakini bisa membawa tatanan ekonomi di wilayah pedesaan menjadi lebih baik. BUMDes adalah salah satu pilar kesejahteraan bangsa yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama, selain bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Selanjutnya BUMDes dapat diartikan sebagai perseroan terbatas (PT) yang dikelola oleh desa dan keuntungannya digunakan 100% untuk kepentingan desa, misalnya membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan (Setiawan dan Rondo, 2017:112).

Pengertian berikutnya seperti diutarakan oleh Suaib (2017:47-48) dikatakan bahwa BUMDes merupakan lembaga keuangan desa atau kelurahan yang didirikan melalui ketetapan PERDES dan merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepada kegiatan ekonomi dan

sosial dengan prinsip kebersamaan dan dikelola menggunakan prinsip keuangan formal. Menyambung hal tersebut, Ibrahim (2018:24) juga menyatakan bahwa BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal guna memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

B. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dasar hukum yang mengatur mengenai BUMDes, yang pertama adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Di dalam pasal 1, dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lengkap mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. BUM Desa didirikan sebagai upaya dalam menampung kegiatan ekonomi Desa dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerjasama antar Desa (pasal 2).

Regulasi kedua adalah Undang-Undang No. 6 tentang Desa. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa, BUMDes adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Desa”. BUMDes didirikan oleh Desa, dan lebih lanjut pada pasal 88, dijelaskan bahwa BUMDes didirikan atas kesepakatan melalui musyawarah desa.

Regulasi ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010. Di dalam Pasal 1, dinyatakan bahwa BUMDes adalah “usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”. Pada pasal 2, dijelaskan bahwa untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

C. Tujuan Pembentukan BUMDes

Wahyu dan Setiawan (2017:164) mengatakan bahwa “pengembangan BUMDes diharapkan dapat mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif desa dan mengefisienkan rantai supply dan demand input dan output pertanian. Dengan itu, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (khususnya petani), dapat meningkat. Artinya, BUMDes diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan input, produksi, distribusi dan penanganan pascapanen (terutama peningkatan nilai tambah) sektor dan produk pertanian. Lebih jauh berperan dalam penguatan posisi tawar masyarakat desa, penciptaan lapangan kerja atau wirausaha, serta perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan.”

“Perusahaan Daerah/Perusda/BUMD termasuk yang kini sedang digulirkan bersamaan dengan dana desa adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) harus menjadi penopang utama PAB untuk pembangunan daerah/desa sehingga mampu menyokong APBD; bukan sebaliknya malah menggerogotinya” (Soemarwoto, 2018:16). Menyambung hal tersebut Mayudi dan Nawir (2017:293) mengutarakan bahwa “secara formal tujuan koperasi dan BUMDes sangatlah mulia dan bercita-cita memajukan dan berpihak pada petani,

namun terkadang, pembentukannya yang sekadar untuk menjawab manfaat formal sebuah program, membuat kedua lembaga tersebut mandul dalam memberdayakan bisnis petani, kelompok tani dan masyarakat desa. Perlu adanya basis pemberdayaan BUMDes ini yang profesional dan mengakomodasi unsur-unsur partisipatif di dalamnya, sehingga BUMDes bukan hanya agen bisnis pemerintah di desa tetapi berperan ganda sebagai agen pemberdayaan bisnis di desa.”

“Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil merupakan program yang harus selalu menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah maupun swasta, terutama bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut dengan upaya membantu peningkatan kegiatan ekonomi (usaha mikro) yang dilaksanakan oleh masyarakat kecil atau miskin. Kendala atau masalah yang paling banyak dirasakan oleh pengusaha mikro adalah tentang sulitnya para pengusaha mikro tersebut dalam memperoleh pinjaman untuk tambahan modal. Hal ini dikarenakan para pengusaha mikro tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yang diberlakukan bank baik bank pemerintah maupun swasta” (Suaib, 2017:47).

“Dalam Undang-Undang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diharapkan pemerintah desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah” (Ibrahim, 2018:20).

D. Prinsip Tata Kelola BUMDes

Sofyan (2015) mengungkapkan “untuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes nantinya bahwa Pengelolaan BUMDes

harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.”

Masih dalam Sofyan (2015) dikatakan bahwa “prinsip-prinsip ideal pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan lebih mendalam agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah kabupaten/walikota, dan masyarakat. Prinsip pengelolaan yang dimaksud adalah: (1) Kooperatif, (2) Partisipatif, (3) Emansipatif, (4) Transparan, (5) Akuntabel, (6) Sustainabel.

Prinsip dasar pengelolaan BUMDes ini diharapkan dapat membawa pengaruh positif dalam kinerja dan produktivitas anggotanya. Selain itu, dengan “menghayati dan mengamalkan” prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membuat BUMDes tidak hanya mampu menghidupi masyarakat desa dimana lembaga ini berada, namun lebih luas lagi juga bisa menularkan manfaatnya ke wilayah lain dalam skala yang lebih besar.”

E. Aspek Kepemimpinan

Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah salah satu kunci keberhasilan BUMDesa sebagai sebuah lembaga. Konsep struktur yang memiliki kejelasan tugas dan wewenang sangat menentukan proses kerja lembaga ini. Tapi tentu saja juga sangat dipengaruhi kualifikasi personal orang-orang yang duduk di sana. Setidaknya ada tiga posisi yang paling penting yakni Ketua atau direktur, sekretaris dan bendahara. Anda bisa menciptakan istilah lain untuk tiga

posisi ini. Tetapi yang pasti fungsi ketua jelas sangat sentral karena menjadi nahkoda yang akan memimpin jalannya lembaga. Karena BUMDesa lekat dengan kepentingan usaha maka seorang ketua haruslah memiliki visi usaha yang kuat sekaligus mampu melakukan konsolidasi sosial alias memiliki kemampuan pendekatan pada masyarakat (Aryadjih, 2017).

F. Aspek Lingkungan Sosial dan Budaya

Ridlwan (2014) menyatakan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa. Tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat berjalannya BUMDes secara baik. Dengan demikian kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen (2016) di desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya bahwa keberadaan BUMDES untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Kemudian diberikan saran bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya segera membentuk pengelolaan BUMDES supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDES untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.

G. Aspek Lingkungan Fisik

Dalam artikel yang dibuat oleh Januarti (2017) dikatakan bahwa “munculnya UU Desa dan UU Keistimewaan DIY telah mendasari berbagai kawasan perdesaan dalam mengembangkan lingkungan. Di Desa Sendangsari yang menjadi unit penelitian, strategi pengelolaan lingkungan dilakukan sebagai bentuk pengembangan pariwisata. Informan yang terlibat dalam proses penelitian adalah Kepala Desa, pengurus lembaga desa yakni LPMD, PKK, Karang Taruna dan Pelaku Pariwisata yakni Ketua Kelompok Sadar Wisata. Selain itu juga melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai stakeholder pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilaksanakan Desa Sendangsari dalam upaya pengelolaan lingkungan sebagai implementasi UU Desa dan UU Keistimewaan DIY adalah 1) Pemetaan lingkungan berupa potensi desa; 2) Pemberdayaan sosial untuk optimalisasi potensi wisata; 3) Pemanfaatan lingkungan sebagai kawasan pengembangan Desa Wisata; 4) Daya dukung pemerintah dalam pengelolaan Desa Wisata.” Penelitian selanjutnya mengenai pentingnya aspek lingkungan fisik dilakukan oleh Swandari *et al* (2017). Ditemukan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja BUMDes adalah rendahnya kinerja karyawan BUMDes.

H. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan serta pengelolaan BUMdes yang tepat dan baik, merupakan kerangka bangun terwujudnya perekonomian desa yang demokratis, dengan kata lain memiliki dampak berkesesuaian dengan misi Masyarakat ASEAN yang mengharuskan masyarakat siap dan berdaulat dalam konsekuensi apapun. Sehingga tujuan dari terselenggaranya BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa, dapat membawa pengaruh besar terhadap

pembangunan ekonomi nasional, dan pada akhirnya Indonesia berdaulat secara ekonomi yang siap menghadapi tantangan globalisasi dalam skala perekonomian regional maupun internasional (Harmiati dan Zuhakim, 2017).”

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai BUMDes telah banyak dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian Agusliansyah (2016) menegaskan bahwa kepala desa sangat berpengaruh di dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Paser. Tidak hanya sebagai penasihat, Kepala Desa berperan juga sebagai pengawas dan coordinator kegiatan usaha BUMDes yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mendorong kemandirian masyarakat.
- 2) Penelitian Swandari *et al* (2017) menyimpulkan bahwa ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan BUMDes di Kabupaten Jembrana. Lebih lanjut dalam penelitiannya disebutkan bahwa pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat diperlukan dalam menjalankan BUMDes dan gaya kepemimpinan demokratis yang melibatkan karyawan, terbukti mendorong semangat kerja karyawan.
- 3) Sejalan dengan penelitian Swandari *et al* (2017), penelitian Arianingrum dan Satlita (2017) menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang lebih sesuai dalam mengelola Potensi Wisata Desa Ponggok Kabupaten Klaten adalah *participative management* dimana pemimpin dan bawahan menjalin komunikasi yang efektif dan saling mendukung.
- 4) Penelitian Suhardjo (2004) menyimpulkan bahwa aksesibilitas masyarakat di pedesaan wajib diperhatikan agar masyarakat pedesaan memiliki kesempatan dan kemampuan

keluar dari kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat.

- 5) Penelitian Agung gunanto (2016) menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten diantaranya adalah kendala di dalam SDM yang mengelola BUMDes dan rendahnya partisipasi masyarakat karena minimnya pengetahuan yang dimiliki.
- 6) Penelitian Anggraeni (2016) menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta membawa perubahan pada bidang ekonomi dan social. Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun belum memberikan manfaat langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan penelitian Agusliansyah (2016), Swandari *et al* (2017), dan Arianingrum dan Satlita (2017), dapat dikatakan bahwa faktor kepemimpinan berkontribusi di dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes. Sementara itu, factor lingkungan sosial dan budaya, yang salah satunya berupa sistem pengetahuan yang ada di dalam masyarakat juga berpengaruh di dalam mengembangkan dan mengelola BUMDes. Hal ini dipertegas melalui penelitian Agung [Placeholder1]gunanto (2016). Penelitian Suhardjo (2004) membuktikan bahwa factor lingkungan fisik diantaranya berupa sarana dan prasana desa juga memberikan dampak terhadap perkembangan BUMDes. Pada akhirnya kesuksesan pengelolaan BUMDes seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa namun di dalam penelitian Anggraeni (2016), disebutkan bahwa masyarakat Desa berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. *Objek Penelitian*

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik Desa Kertajaya termasuk pengurus dan pengelola Badan Usahanya di bidang pengelolaan air bersih.

B. *Metode Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan (deskriptif) subjek yang diteliti. Penelitian dekriptif dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan. Oleh karena itu metode pengumpulan data yang dilaksanakan adalah metode survey. Metode survei merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari suatu masalah dengan menggunakan kuesioner.

Selanjutnya menurut Sudarwan Danim dan Darwis (2003), tahapan dalam melaksanakan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian.
- b. Mengumpulkan data di lapangan.
- c. Menganalisis data.
- d. Merumuskan hasil studi.
- e. Menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan.

C. *Teknik Pengumpulan Data*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya (responden). Data primer akan mencakup data yang dihimpun melalui survei dengan menyebarkan kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden untuk diisi. Selain itu, untuk mendapatkan data primer yang akurat, maka juga dilakukan wawancara yang

mendalam serta dokumentasi fisik (area) dan lingkungan tempat BUMDes beroperasi.

Data sekunder, yaitu data yang telah dipublikasikan, juga dihimpun dalam penelitian ini. Data ini antara lain digunakan untuk mengeksplorasi teori dan atau konsep yang terkait dengan koperasi dan perkembangannya hingga saat ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Sekilas Profil Desa Kertajaya*

Desa Kertajaya adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kepala Desa Kertajaya adalah Bapak Sunandar dengan Ibu E. Sumartini sebagai Ibu Kepala Desanya. Luas lahan Desa Kertajaya adalah 382,44 Hektar. Sedangkan luas daerah Pertaniannya adalah 192,44 Hektar. Berdasarkan survei lapangan dan kuesioner yang terisi, jumlah penduduk yang tercatat di akhir tahun 2017 adalah 8.916 jiwa. Motto Desa Kertajaya adalah "GESIT" yang merupakan singkatan dari kata Geger, Endah, Singer, Ikhlas, dan Tulaten.

B. *Pemetaan BUMDes yang Dikelola di Desa Kertajaya*

Desa Kertajaya memiliki BUMDes yang dibentuk oleh Kepala Desanya pada tahun 2014. Adapun Struktur Kepengurusan BUMDes Kertajaya adalah sebagai berikut: Ketua BUMDes: Bapak Endang Djuhana; Sekretaris BUMDes: Bapak Yusonapiyadi; Bendahara: Ibu Ana Kristiana; Anggota: Bapak Nandang Kurnia

Berdasarkan survei lapangan tanggal 3 Desember 2018 dan kuesioner yang terisi oleh Pengurus BUMDes Kertajaya, terdapat beberapa informasi pemetaan BUMDes dari dimensi Tata Kelola BUMDes, Tujuan BUMDes, Kajian Kelayakan BUMDes, dan dimensi Potensi BUMDes yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

C. Pemetaan BUMDes Kertajaya dari Dimensi Tata Kelola

Sejalan dengan ungkapan Sofyan (2015) pada Bab 2, pemetaan BUMDes Kertajaya dari dimensi Tata Kelola akan ditinjau dari penerapan prinsip tata kelola BUMDes yang ideal. Adapun penerapan prinsip tata kelola BUMDes di Desa Kertajaya adalah sebagai berikut:

- 1) *Prinsip Kooperatif*: Masyarakat desa Kertajaya mendukung keberadaan BUMDes dan bidang usaha yang dikerjakan BUMDes. Terbukti mereka berusaha melibatkan diri ke dalam kepengurusan BUMDes dan bidang usaha BUMDes walaupun mereka telah memiliki pekerjaan utama mereka di luar BUMDes dan walaupun dengan honorarium yang tidak tetap.
- 2) *Prinsip Partisipatif*: Di Desa Kertajaya, tidak semua lapisan masyarakat dilibatkan ke dalam proses pembuatan keputusan strategis BUMDes (seperti rencana investasi), namun demikian BUMDes Kertajaya masih menyediakan media bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan bagi pengembangan BUMDes, misalnya melalui Kegiatan Musyawarah Desa.
- 3) *Prinsip Emansipatif*: Setiap warga di desa Kertajaya sangat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usahanya melalui BUMDes. mereka bahkan telah diberikan sosialisasi mengenai visi, misi dan kegiatan BUMDes Kertajaya. Warga juga merasa cukup memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelatihan dari BUMDes.
- 4) *Prinsip Transparan*: Warga Kertajaya merasa cukup mengetahui visi misi dan kegiatan BUMDes. Bagi masyarakatnya, BUMDes Kertajaya cukup rutin untuk mengumumkan program kerja dan laporan hasil usahanya kepada masyarakat.

- 5) *Prinsip Akuntabel*: Kegiatan BUMDes Kertajaya telah dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku baik dari sisi operasional maupun dari sisi pengarsipan dokumen/bukti transaksi usahanya. Keberadaan BUMDes dianggap cukup diberdayakan demi peningkatan perekonomian daerahnya.
- 6) *Prinsip Sustainable*: BUMDes Kertajaya dianggap telah dapat membangun iklim usaha di daerahnya serta dianggap cukup membantu warganya dalam mengembangkan usahanya melalui kegiatan pendampingan.

Selain dari penerapan Prinsip Tata Kelola BUMDes, Pemetaan BUMDes disajikan berdasarkan berbagai aspek sebagai berikut:

- 1) *Aspek Kepemimpinan*: Kepala Desa Kertajaya cukup melakukan berbagai upaya untuk mendorong warganya memanfaatkan keberadaan BUMDes bagi pengembangan usahanya. Semua keputusan yang diambil selalu semata-mata demi kepentingan masyarakat desanya. Ia mengajak warganya untuk terlibat dalam pengembangan BUMDes dan selalu berupaya memberikan kemudahan- kemudahan demi kemajuan usaha warganya.
- 2) *Aspek Lingkungan Sosial dan Budaya*: Latar belakang Pendidikan masyarakat desa umumnya berpendidikan Sekolah Dasar. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Kertajaya adalah menjadi petani. Berdasarkan survei lapangan tertanggal 3 Desember 2017, kondisi perekonomian masyarakat desa dianggap masih lemah.
- 3) *Aspek Lingkungan Fisik*: Desa Kertajaya memiliki beberapa fasilitas publik sebagai berikut: Sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak, SMP dan SMA; Sebuah pasar; bangunan tempat ibadah; tempat wisata.; rumah sakit; perpustakaan; Kantor Pos

Selain fasilitas publik di atas, Desa Kertajaya selalu mengembangkan infrastuktur desanya, salah satunya adalah jalan akses menuju desa yang saat ini sedang diaspal/beton secara bertahap. Komitmen mereka adalah membuat seluruh jalan akses telah teraspal/beton dalam jangka waktu dekat. Sumber daya alam Desa Kertajaya cukup mendukung keberadaan BUMDes terutama dari segi penyediaan air bersih. Fasilitas listrik yang disalurkan oleh PLN telah menjangkau seluruh wilayah Desa Kertajaya. Hanya sangat disayangkan bahwa jaringan internet dan komunikasi yang tersedia masih jauh dari kata memadai.

D. Pemetaan BUMDes Kertajaya dari Dimensi Tujuannya

- 1) *Kesejahteraan Masyarakat*: Keberadaan BUMDes Kertajaya dinilai cukup mampu untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Namun demikian, kontribusinya dalam meningkatkan pelayanan umum dan pemerataan perekonomian Desa masih dirasakan kurang.
- 2) *Pengembangan Bisnis*: Keberadaan BUMDes Kertajaya cukup mampu meningkatkan lapangan pekerjaan serta memotivasi masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa. Potensi desa Kertajaya saat ini tengah diberdayakan dengan mendirikan beberapa unit usaha seperti: (1) Unit Usaha Air / PAB (Pengolahan Air Bersih), (2) Unit Usaha Rakit, (3) Unit Usaha Parkir, (3) Unit Usaha Perikanan. SK unit usaha tersebut dibuat oleh BUMDes. Dana hasil usaha yang diperoleh oleh BUMDes, dialokasikan sebagai berikut: Aparat & Staff = 30%, Desa = 30%, untuk operasional & ATK = 20%, Penambahan Modal = 10%, Pembayaran Utang = 10%. Rencana penyetoran dari BUMDes ke

Desa, dapat diuraikan sebagai berikut: Tahun 2014-2017 Rp 2.400.000,00 per-tahun. Tahun 2018 Rp 9.900.000,00. per-tahun Rencana Tahun 2019 = Rp 12.000.000,00. per-tahun.

E. Pemetaan BUMDes Kertajaya dari Dimensi Kajian Kelayakan BUMDes

- 1) *Aspek Pemasaran*: Menurut hasil wawancara dengan pengurus BUMDes dan Pengelola usaha PAB, pemancingan mereka dikunjungi oleh ratusan pengunjung dan permintaan air bersih meningkat dari waktu ke waktu. Masyarakat sangat membutuhkan air bersih terutama saat musim kemarau.
- 2) *Aspek Produksi*: Produk unggulan BUMDes Kertajaya yang berpotensi untuk dikembangkan adalah air bersih. Mereka mengelola dan memproduksi air bersih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya disertai dengan kualitas tinggi dan teknologi yang tepat. Namun terkadang, kapasitas produksi air bersih tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan konsumennya terutama di musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh:
 - Peningkatan permintaan air untuk konsumen yang baru
 - Masih banyaknya penduduk yang menggunakan air yang dikelola oleh BUMDes (Melalui Unit Usaha PAB) dengan cara memintanya dari penduduk yang berlangganan air bersih.
- 3) *Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia*: Pengelolaan BUMDes Desa Kertajaya dilakukan oleh pemimpin yang baik dan staf/karyawan yang berdedikasi untuk mengembangkan BUMDes-nya. Sumber daya manusia yang dilibatkan ke dalam pengelolaan unit usahanya juga merupakan orang yang terampil dan kompeten di bidangnya. Mereka memiliki kesempatan untuk diikutsertakan ke dalam pelbagai pelatihan yang berguna untuk menambah pengetahuan mereka dalam mengelola

unit usahanya. Pengelola BUMDes juga sangat setuju bahwa BUMDes Desa Kertajaya telah memiliki asas dan struktur organisasi yang efektif dan efisien.

- 4) *Aspek Keuangan*: Dari sisi aspek Keuangan, Pengurus BUMDes cukup setuju bahwa kebutuhan akan investasi awal unit usahanya dapat dihitung dengan mudah. Mereka mampu memprediksi dengan baik bahwa pemasukan unit usahanya mampu melebihi pengeluarannya dan mampu menggapai titik impasnya (Break Even Point) dalam waktu yang ditentukan. Dari sisi pendanaan, mereka dapat memperoleh sumber dana investasi usaha mereka dengan mudah. Kedati demikian, tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan unit usaha BUMDes adalah tingginya/besarnya jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal unit usaha tersebut.
- 5) *Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik*: Pengurus BUMDes Kertajaya menyatakan sangat setuju bahwa keberadaan BUMDes Kertajaya bermanfaat bagi banyak warga desanya. Kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDes Kertajaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat, bahkan sebaliknya beberapa kehidupan sosial negatif yang terjadi di antara warganya dapat dialihkan menjadi kegiatan yang positif. Contoh: melalui unit usaha perikanan, BUMDes memiliki beberapa perahu. Perahu yang dimiliki sampai dengan saat ini ada 3 perahu, dan bagi yang menyewa perahu dikenakan biaya. Perahu ini digunakan oleh pemuda-pemuda yang menganggur untuk mencari ikan pada malam hari. Pembagian hasil untuk unit usaha perikanan/nelayan 40% dan kepada pengelola 40%, 20% untuk biaya operasional seperti kerusakan perahu.

- 6) *Aspek Lingkungan Usaha*: Pengurus BUMDes Kertajaya menyatakan bahwa keberlangsungan hidup unit usahanya cukup aman jika dilihat dari aspek lingkungan usahanya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya persaingan produk usahanya sebagai akibat dari tidak adanya pelaku bisnis yang masuk ke desa dengan membawa produk pengganti (substitusi) unit usaha BUMDes dan masih rendahnya kekuatan tawar menawar baik dari pembeli maupun dari pemasok.

- 7) *Aspek Lingkungan Hidup*: Pengurus BUMDes Kertajaya menyatakan bahwa unit usaha yang dijalankan tidak merusak lingkungan hidup karena limbah dari usahanya dapat dikelola dengan baik, sebaliknya mereka cukup setuju bahwa keberadaan unit usahanya justru dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- 8) *Aspek Hukum*: Pengurus BUMDes Kertajaya menyatakan bahwa unit usaha yang dikelolanya selaras dengan rencana pembangunan desa (RPJMDes). Pengurus dan pengelola usaha mereka diambil dari daerah pedesaan. Bentuk badan hukum dari kegiatan usahanya cukup mudah diurus dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes berdiri di atas tanah milik desa dimana status lahannya jauh dari persengketaan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

F. Pemetaan BUMDes Kertajaya dari Dimensi Potensi BUMDes

- 1) *Potensi di bidang perikanan*: Desa Kertajaya memiliki potensi perikanan dengan media tambak, kolam/empang, danau, dan waduk/dam/sungai.
- 2) *Potensi di bidang pengairan/irigasi pertanian*: Adanya danau, sungai, mata air, sumur/lading di desa Kertajaya membuahakan potensi bagi desa Kertajaya di bidang pengairan

- 3) *Potensi di bidang Pariwisata*: Potensi di bidang pariwisata pada Desa Kertajaya timbul karena desa tersebut memiliki gua dan situs budaya/purbakala/Religi yang menarik untuk dikunjungi sebagai objek wisata.
- 4) *Potensi di bidang Hiburan*: Desa Kertajaya belum memiliki taman, tempat bilyard, bioskop, dan ruang musik sebagai sarana hiburannya
- 5) *Potensi di bidang Lainnya*: Desa Kertajaya telah belajar untuk melakukan proses pengelolaan air bersih. Mereka bercita-cita pula untuk memproduksi air minum gelas/gallon
- 6) *Potensi BUMDes Kertajaya yang sedang dalam tahap perencanaan dan/atau pengembangan*:
 - Unit Usaha Air Bersih (PAB) → Produksi air dan isi ulang air gallon
 - Unit Usaha Rakit → Unit usaha ini menyewakan rakit bagi warga yang hendak berlayar di perairan desa tersebut. Pembagian pendapatan dari usaha rakit ini adalah: 40% untuk nelayan, 40% untuk pengelola dan 20% untuk operasional
 - Unit Usaha Parkir → Disewakan sebagai lahan parkir bagi warga yang sedang berkaryawisata namun membawa kendaraan.
 - Unit Usaha Perikanan → membuat tempat pemancingan.

G. Kompetensi Pengelola BUMDes Kertajaya

Pengurus BUMDes Kertajaya memiliki kemampuan memahami filosofi BUMDes dengan baik. Beberapa di antara mereka merasa cukup mampu (skala 3 dari 5 skala) memahami filosofi BUMDes, beberapa di antaranya mengaku mampu (skala 4 dari 5 skala) dan sangat mampu (skala 5 dari 5 skala) untuk memahami filosofi BUMDes.

Dari sisi kemampuan memahami ide usaha sosial, umumnya para pengurus

BUMDes Kertajaya mampu memiliki cara pandang wirausaha berwatak sosial. Mereka memiliki visi untuk memutuskan rantai kemiskinan di desa, salah satunya melalui perekrutan Karang Taruna. Namun, berdasarkan data survei dan kuesioner, tidak semua pengurus BUMDes Kertajaya memiliki kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan kesempatan usaha demi kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi kemampuan menganalisis potensi Desa, 20% dari Pengurus BUMDes Kertajaya tidak memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan usaha atau untuk mengambil risiko. 40% dari Pengurus BUMDes merasa sulit untuk mengidentifikasi dan memunculkan ide baru untuk melihat potensi usaha baru. Gambaran serupa juga terjadi jika melihat kemampuan pengurus BUMDes saat memilih peluang usaha, merancang model bisnis, dan dalam hal menyusun kelayakan dan rencana usaha. Namun satu di antara mereka sangat fasih melakukannya.

Dari sisi kemampuan menyusun kelembagaan umumnya telah dikuasai dengan baik oleh mereka. Hanya satu di antara pengurus BUMDes Kertajaya yang mengaku tidak mampu membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta sulit untuk menyusun tata cara dan prosedur pengelolaan BUMDes.

Para pengurus BUMDes Kertajaya mengakui bahwa mereka masih membutuhkan pelatihan dengan topik: Pelatihan tentang Kepengurusan BUMDes; Pelatihan tentang Tata Cara Pengembangan BUMDes; Pelatihan tentang Pengembangan Usaha Desa/UMKM dari tahap pengurusan perijinan hingga pengelolaannya (Strategi Pemasaran).

H. Gambaran Pengelolaan PAB Tirta Jaya

- 1) *Sekilas Profil Perusahaan Tirta Jaya I*: PAB Tirta Jaya I merupakan salah satu unit usaha unggulan dari Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) Kertajaya. Pendirian Pengelolaan Air Bersih berawal dari adanya hibah berupa sumur bor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014. Pengurus Pengelolaan Air Bersih (PAB) Tirta Jaya I terdiri dari 5 orang. Pada saat ini PAB Tirta Jaya I memiliki konsumen sebanyak 387 keluarga dan memenuhi kebutuhan air untuk lebih dari 1.000 orang. Biaya yang dikenakan terhadap konsumen adalah Rp 2.000 per 1 kubik air. Prosedur pembayaran air adalah :

- Tanggal 1-15 setiap bulan, pengurus menagih pembayaran ke rumah konsumen.
- Tanggal 16-akhir bulan, konsumen membayar langsung ke kantor Pengelolaan Air Bersih (PAB) Tirta Jaya I.

2) Profil Pengurus PAB Tirta Jaya I: *PAB Tirta Jaya I dikelola oleh 5 orang warga yang melakukannya sebagai wujud swadaya masyarakat. Masa kepengurusan PAB Tirta Jaya I adalah 3 tahun. Mayoritas pengurus PAB Tirtajaya berjenis kelamin pria. Usia pengurus PAB Tirta Jaya I umumnya masih muda di kisaran usia 20-29 tahun. Mayoritas latar belakang Pendidikan mereka adalah lulusan SMA. Namun beberapa di antaranya adalah lulusan SMP dan SD. Profesi mereka adalah buruh atau guru atau wirausahawan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa keterlibatan mereka dalam pengelolaan air bersih ini adalah wujud kepedulian mereka untuk mengembangkan kesejahteraan Desa. Beberapa di antara mereka tidak memiliki tanggungan di rumah, namun terdapat satu pengurus yang memiliki 4 orang tanggungan di rumahnya dan ada yang memiliki 1 atau 2 tanggungan di rumahnya. Penghasilan rata-rata dalam kurun 3 tahun terakhir tidaklah pasti bagi mereka. Namun maksimum penghasilannya adalah Rp.1.000.000,-*

3) *Kesejahteraan Pengurus PAB Tirta Jaya I: Mayoritas pengurus PAB Tirta Jaya I menyatakan bahwa mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan sandang setiap anggota keluarganya setiap hari. Kebanyakan dari mereka tidak mampu membayar asuransi kesehatan seluruh anggota keluarganya. Menurut penuturan mereka dalam wawancara tertanggal 3 Desember 2018, Ketidakmampuan mereka dalam ikut serta asuransi kesehatan (BPJS) adalah masih minimnya sosialisasi program BPJS di daerah tersebut khususnya yang bebas biaya. Di sisi Pendidikan, kemampuan pengurus PAB Tirta Jaya I untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan masih minim, bahkan ada anggota keluarga di antara mereka yang belum mampu membaca dan menulis dengan baik. Kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologi masih tergolong minim.*

I. Kompetensi Pengelola PAB Tirta Jaya I, Desa Kertajaya

Pengelola PAB Tirta Jaya I menyatakan cukup mampu memahami filosofi BUMDes (namun di tingkat rata-rata). Sebagian besar dari mereka memiliki kemampuan di tingkat rata-rata dalam memahami ide usaha sosial dan potensi usaha. Mereka juga memiliki kemampuan di tingkat rata-rata dalam memilih peluang usaha dan merancang model bisnisnya. Hanya satu SDM yang menyatakan ketidakmampuannya dalam membuat laporan keuangan.

Sekitar 80% dari pengelola PAB Tirta Jaya I mampu menyusun kelayakan dan rencana usaha. Sekitar 40% dari mereka mengalami kesulitan dalam membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha yang mereka kelola. Mayoritas dari mereka memiliki kemampuan rata-rata dalam mengelola bisnis dan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal pelatihan, berdasarkan kuesioner yang

mereka serahkan, mereka belum memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Adapun jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan PAB Tirta Jaya 1 adalah Manajemen Bisnis.

J. Pembahasan tentang Kendala BUMDes Kertajaya dan Unit Usaha PAB Tirta Jaya I

Kendala yang dihadapi oleh Pengurus BUMDes Kertajaya adalah sebagai berikut: Tantangan dalam mengembangkan Unit Usaha Desa dengan Investasi awal yang tidak sedikit; Jaringan internet dan komunikasi yang belum memadai; Kondisi infrastruktur, seperti perbaikan jalan akses menuju desa tersebut yang belum memadai/nyaman dilalui kendaraan; Regenerasi kepengurusan BUMDes yang kurang berjalan mulus akibat minimnya minat warga muda yang bersedia mengabdikan dirinya di BUMDes ini; Laba Operasi yang belum memadai untuk membayar SDM secara pasti dan layak.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pengembangan Unit Usaha PAB Tirta Jaya I adalah sebagai berikut:

- Terdapat peningkatan permintaan air untuk konsumen yang baru, sementara kendala yang dihadapi adalah daya pancar dari air yang dihisap pompa air yang dimiliki saat ini kurang optimal untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang baru. Terlebih saat musim kemarau, banyak masyarakat yang berbagi air dengan sekitarnya dari saluran yang sama sehingga kebutuhan masyarakat sulit diprediksi dan mendadak meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi kendala ini diperlukan tabung pompa air (water pressure tank) dengan kapasitas yang lebih besar dan diestimasi memerlukan dana sekitar Rp 25.000.000.
- Air yang dihasilkan Pengelolaan Air Bersih (PAB) Tirta Jaya I telah beberapa kali diperiksa dan dinyatakan layak untuk diminum, tetapi sampai saat ini

Pengelolaan Air Bersih (PAB) Tirta Jaya I belum memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa air yang dihasilkan layak untuk diminum.

- Regenerasi kepengurusan.
- Saat ini, PAB Tirta Jaya masih sulit untuk melakukan regenerasi kawula muda di daerah tersebut, walaupun terdapat beberapa tenaga kerja yang masih muda namun dengan jumlah yang sangat terbatas. Hal ini akan menjadi suatu keterbatasan bagi PAB Tirta Jaya dalam upaya pengembangan bisnisnya.
- Laba Operasi yang belum memadai untuk membayar SDM secara pasti dan layak. Sehingga tenaga kerja yang turut serta dalam pengelolaan unit usaha ini dapat memperoleh imbal jasa yang lebih pasti dan layak sebagai salah satu wujud penghargaannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari Analisa kami adalah sebagai berikut:

- Tata kelola BUMDes Kertajaya telah berkembang dan berjalan dengan baik. Walaupun dari aspek lingkungan sosial dan budaya, kondisi Desa Kertajaya belum memadai dalam menunjang keberadaan BUMDes, namun sebaliknya keberadaan BUMDes Kertajaya dianggap mulai mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya termasuk dalam hal peningkatan lapangan pekerjaan dan dalam hal memotivasi masyarakat untuk mengelola potensi desa. Dari dimensi kajian kelayakannya, BUMDes Kertajaya dinilai layak untuk dikembangkan lebih lanjut mengingat potensinya di bidang air bersih, pariwisata, hiburan, pertanian, sarana dan perikanan.

- Kendala yang dihadapi oleh BUMDes Kertajaya adalah keterbatasan fasilitas internet, pendanaan unit bisnisnya, regenerasi SDM, minimnya laba operasinya dan keterbatasan sarana prasarana.
- Potensi PAB Tirta Jaya untuk mengembangkan usahanya di bidang penyediaan air bersih cukup tinggi khususnya dalam hal bahan baku (air) dan pemasarannya. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh unit usaha PAB Tirta Jaya, yaitu: kurang memadainya peralatan yang tersedia saat ini untuk pengembangan/ekspansi bisnis, minimnya laba operasi yang menyebabkan sistem imbal jasa bagi para pengelolanya masih belum pasti dan minim, sulitnya PAB Kerta Jaya dalam melakukan regenerasi SDM, serta belum tingginya nilai jual bisnis PAB Tirta Jaya yang saat ini sedang dijalankan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas khususnya mengenai permasalahan dan potensi BUMDes dan PAB Tirta Jaya di Desa Kertajaya, Cianjur, maka saran yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran atau rekomendasi untuk BUMDes Kertajaya, Cianjur:
 - Melakukan pembangunan infrastruktur dan pengembangan jalur komunikasi yang lebih memadai.
 - Adanya pendampingan kepada BUMDes Kertajaya dalam hal pendanaan/pencarian donator untuk investasi awal unit usahanya.
 - Adanya pendampingan dalam hal penyusunan struktur penghargaan yang lebih baik dan konsisten.
 - Memperkuat setiap unit usaha di bawah naungan BUMDes menjadi Unit Usaha yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi dan sosial.

2. Saran atau rekomendasi untuk Unit Usaha PAB Tirta Jaya:

- Mencari donatur atau melakukan peminjaman uang ke bank untuk mengganti tabung pompa air (*water pressure tank*) dengan kapasitas yang lebih besar.
- Mencari informasi tentang tata cara pengujian kualitas air sumur ke Dinas Lingkungan Hidup untuk memperoleh sertifikat bahwa air layak diminum setelah dimasak terlebih dahulu
- Memperbaiki struktur penghargaan untuk mendukung proses perekrutan yang efektif

Adanya pendampingan dalam upaya penambahan/pengembangan bisnis yang memiliki nilai jual dan mampu mendongkrak perekonomian warga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami haturkan pada Universitas Kristen Maranatha yang telah mendanai pengabdian masyarakat Prodi S1 Akuntansi. Serta kepada BUMDes Kertajaya dan PAB Tirtajaya, Cianjur, atas kerjasamanya dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat kami.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Putera, AD. BPS: Maret 2018, Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999. [Online]. Available: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>. [Diakses 03 Desember 2018]
- [2] Ibrahim., *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2018.

- [3] Januarti., "Strategi Pengembangan Lingkungan Sebagai Kawasan Desa Wisata Di Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY.," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 12, no. 1, pp. 71-86, 2017.
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Indonesia,.
- [5] Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Desa,.
- [6] Indonesia Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,.
- [7] Wahyu dan Setiawan I., *BUMN Pangan: Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2017.
- [8] Agunggunanto EY, Ariant F, Kushartono EW dan Darwanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, vol. 13, no. 1, pp. 67-81, 2016.
- [9] Agusliansyah K., "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser," *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 4, pp. 1785-1796, 2016.
- [10] Anggraeni, M.R.R.S., "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta," *Modus*, vol. 28, no. 2, pp. 155-167, 2016.
- [11] Aryadjih. (2018) www.berdesa.com. [Online]. Available: <http://www.berdesa.com/seperti-apa-seharusnya-struktur-bumdesa/> [diakses 03 Desember 2018]
- [12] Danim, Sudarwan dan Darwis., *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003.
- [13] Djanegara, S.M., *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik dan Permasalahan*. Bogor: Kesatuan Press, 2017.
- [14] Maryudi A. dan Nawir A.A., *Hutan Rakyat di Simpang Jalan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- [15] Ridlwan, Z., "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 3, 2014.
- [16] Setiawan J., dan Rondo W.N., *Merah Putih Tergadai Di Perbatasan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- [17] Soemarwoto, S., *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita. Jilid 2*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2018.
- [18] Suaib, H., *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: AnImage, 2017.
- [19] Syarif A., dan Zainuddin M., *Inti Sari Sosiologi Pertanian. Undang-undang Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes Indonesia*. Makassar: CV. Inti Mediatama, 2017.

- [20] Suhardjo, A.M.L.O.M., "Aksesibilitas dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan di Perdesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Pedesaan di Propinsi, Sulawesi Tenggara," *Jurnal Transportasi*, vol. 4, no. 2, pp. 149-160, 2004.
- [21] Zakaria, H.G., *5 Pilar Revolusi Mental Untuk Aparatur Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- [22] Zulkarnaen, R.M., "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 1-4, 2016.
- [23] Halmiati dan Zuhakim A.A. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. [Online]. Available: <http://setnasasean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0f03a8a119-14-cluster-ekonomi-unihaz.pdf>. [Diakses 03 Desember 2018].
- [24] Prasetyo, R. A. Peranan Bumdes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/317088682> [Diakses 03 Desember 2018].
- [26] Sofyan, A. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. [Online]. Available: <http://www.keuangandes.com/2015/09/prinsip-tata-kelola-badan-usaha-milik-desa/>. [Diakses 03 Desember 2018].
- [27] Swandari NKAS., Setiawina N.D. dan Marhaeni AAIN., "Analisis Faktor-faktor Penentu Kinerja Karyawan BUMDes di Kabupaten Jembrana," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, vol. 6, no. 4, pp. 1365-1394, 2017.